**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teoritis untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian yang akan dilakukan. Landasan teoritis ini berisi teori-teori yang relevan dan mendasari *timeliness* (*grand theory*/teori utama) seperti teori agensi dan teori sinyal, kemudian teori laporan keuangan, *timeliness*, manajemen laba, dan teori *good corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit.

Selain teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, pada bab ini juga akan membahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan dari masing-masing variabel penelitian. Dari landasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti dan akan dibuktikan dengan dilaksanakannya penelitian.

1. **Landasan Teoritis**

***Grand Theory***

1. **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi merupakan dasar teori yang digunakan dalam praktik bisnis perusahaan. Teori agensi menurut Scott (2015: 358):

“*Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contarcts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interest would otherwise conflict with those of the principal.*”

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976):

“*A contract under which one or more persons (principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.*”

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan di atas, hubungan yang timbul antara *principal* dengan *agent* dilandasi karena adanya kontrak. *Principal* adalah pemilik perusahaan yang memberikan wewenang kepada *agent*, manajer perusahaan, untuk menjalankan perusahaan yang dimilikinya. Teori di atas juga mengemukakan adanya konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Dalam kontrak antara *principal* dengan *agent*, disyaratkan target-target yang harus dicapai *agent* agar dapat memperoleh insentif dari *principal*. *Principal* menginginkan timbal balik atas investasi yang dilakukannya, sehingga target-target yang disyaratkan *principal* berupa perolehan laba yang tinggi agar *principal* mendapatkan dividen yang tinggi.

*Agent* menginginkan insentif yang dijanjikan *principal* dalam kontrak sehingga *agent* akan berusaha memenuhi target perolehan laba yang disyaratkan *principal.* Karena adanya kepentingan *agent* untuk memperoleh insentif tersebut, maka *agent* akan menampilkan laporan keuangan yang seolah-olah kinerja perusahaan baik sehingga labanya tinggi, tetapi sebenarnya laba yang tinggi tersebut tidak mencerminkan kinerja perusahaan sesungguhnya.

Adanya konflik yang terjadi antara *principal* dengan *agent* seperti yang dikemukakan di atas karena teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia seperti yang dikemukakan Eisenhardt (1989) yaitu: (1) manusia umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan tiga asumsi sifat dasar manusia tersebut, *agent* akan berusaha bertindak *opportunistic* yaitu mementingkan kepentingannya sendiri.

Selain karena adanya perbedaan kepentingan dan kecenderungan manusia yang mementingkan kepentingannya sendiri, terdapat faktor lain yang mengakibatkan konflik antara *principal* dengan *agent*. Teori agensi mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara *principal* dengan *agent*. Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana manajer (*agent*) memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki pihak luar (Herza, 2014). Manajer (*agent*) sebagai pihak pengelola perusahaan akan lebih mengenal perusahaan karena terlibat dengan kegiatan operasional perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Manajer harus melaporkan kinerja perusahaan kepada *stakeholders* termasuk *principal* melalui laporan keuangan. Akan tetapi, karena adanya asimetri informasi, manajer dapat menyimpan beberapa informasi, baik informasi yang bagus maupun informasi yang buruk mengenai kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, konflik yang timbul antara *agent* dengan *principal* mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dilaporkan oleh *agent*. Adanya perbedaan kepentingan dimana *agent* akan berusaha memenuhi target yang diberikan *principal* karena menginginkan insentif yang telah disetujui dalam kontrak, membuat *agent* akan menampilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan target dalam kontrak yang disetujui antara *agent* dengan *principal*. *Agent* yang belum memenuhi target dari *principal* akan menggunakan segala cara untuk memenuhi target tersebut termasuk menunda menyampaikan laporan keuangan. Keinginan *agent* untuk memperoleh insentif sesuai dengan sifat dasar manusia yaitu *opportunistic*, mementingkan kepentingannya sendiri.

Adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal* semakin mempengaruhi *agent* untuk bertindak *opportunistic*. Ketika asimetri informasi tinggi, *stakeholders* tidak memiliki sumber daya yang cukup atau akses atas informasi yang relevan untuk memonitor tindakan manajer, dimana hal tersebut memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba (Herza, 2014). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajer (*agent*) kepada *stakeholders* termasuk di dalamnya pemilik perusahaan (*principal*) menjadi menyesatkan bagi *stakeholders* karena ada informasi yang tidak diberikan manajer kepada *stakeholders* sehingga *stakeholders* sulit mengukur kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

1. **Teori Sinyal (*Signaling Theory*)**

Menurut Jaswadi (2004):

“Teori sinyal dalam akuntansi salah satu fungsinya untuk menilai adanya informasi privat. Dalam pasar modal, pelaku pasar melakukan keputusan ekonomi dengan dasar informasi publikasian, pengumuman, konferensi pers, dan *filling* kepada regulator. Namun demikian, para manajer masih tetap mempunyai informasi privat yang memuat nilai perusahaan sebenarnya.”

Informasi privat kadang-kadang mengindikasikan bahwa nilai perusahaan lebih tinggi dari yang terefleksikan dalam harga saham saat ini. Untuk mentransfer informasi ini, manajer dapat men*disclose* secara langsung. Namun, pengungkapan eksplisit mungkin berbahaya pada perusahaan dengan alasan kompetitif atau larangan dari klausal perjanjian kerahasiaan perusahaan. Ketika pengungkapan langsung tidak mungkin dilakukan, manajer dapat memberikan sinyal tertentu bahwa harga saham *underpriced*.

Dengan rasional teori sinyal, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik seharusnya mengandung sinyal *good news* atas nilai perusahaan. Kecepatan penyampaian laporan keuangan mengindikasikan ada efisiensi dalam sistem informasi akuntansi dan operasi manajerial.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *signalling theory* adalah teori yang menjelaskan perilaku manajemen dalam mengkomunikasikan suatu informasi tentang perusahaan, dimana perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kabar baik (*good news*). Perusahaan yang memiliki kabar baik cenderung ingin segera menyampaikan kabar baik tersebut kepada publik sehingga harga saham diharapkan meningkat. Sebaliknya, perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut berusaha menutupi kabar buruk (*bad news*) kepada publik yang dapat berdampak pada penurunan harga saham (Givoly dan Palmon, 1982). Jadi teori sinyal ini menyatakan bahwa akurasi dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke publik adalah sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan investasi bagi pihak di luar perusahaan.

**Laporan Keuangan**

1. **Definisi Laporan Keuangan**

Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015: 2):

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Pengertian laporan keuangan menurut Kieso et al. (2011: 5):

“*Financial statements are the principal means through which a company communicates its financial information to those outside it. These statements provide a company’s history quantified in money terms.*”

Sedangkan menurut PSAK No. 1 (2015: 1):

“Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Laporan keuangan memiliki arti yang penting dalam suatu perusahaan, pada dasarnya laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang berasal dari proses kegiatan akuntansi keuangan yang telah menjalankan aktivitasnya selama periode tertentu. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak dalam (*intern*) perusahaan yaitu manajemen serta pihak luar (*ekstern*) perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), investor, kreditor, kantor pajak, dan lain sebagainya guna menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan, berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dapat mengetahui keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal yang menjadi tanggung jawab manajemen.

1. **Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis. Para pemakai laporan keuangan akan menggunakannya untuk memprediksi, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan pada bagian Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2015: 3):

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

1. **Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan pada bagian Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2015: 5-8) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok dari laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Berikut uraian tentang keempat karakteristik kualitatif pokok tersebut:

1. Dapat dipahami (*Understandbility*)

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Penyajian informasi yang berlebihan harus dihindari karena dapat mengaburkan informasi dan membuat laporan keuangan sulit dipahami. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

1. Relevan (*Relevance*)

Agar dapat bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi masa lalu, masa kini, dan masa depan (*predictive*) dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya (*confirmatory*). Agar relevan, informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum informasi kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil.

1. Keandalan (*Reliability*)

Agar informasi berguna bagi kebutuhan pengguna, maka informasi tersebut harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas audit andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Keandalan mengandung lima aspek yaitu: i) penyajian jujur, ii) substansi mengungguli bentuk, iii) netralitas, iv) pertimbangan sehat, dalam kondisi ketidakpastian digunakan pertimbangan sehat yang mengandung kehatian-hatian, v) kelengkapan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap (*full disclosure*) dalam batasan materialitas dan biaya.

1. Dapat dibandingkan (*Comparability*)

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat saling diperbandingkan baik antar periode untuk mengindentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Disamping itu, informasi dikatakan bermanfaat jika terdapat konsistensi dalam penyajiannya. Akan tetapi, perusahaan diberi keleluasaan untuk mengubah metode akuntansi yang diterapkan selama perubahan tersebut diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan.

1. **Pengguna Laporan Keuangan**

Laporan keuangan digunakan oleh beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda seperti yang tertulis dalam Standar Akuntansi Keuangan (2015: 2-3). Pemakai laporan keuangan meliputi:

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk membayar deviden.

1. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.

1. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

1. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menentukan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas.

1. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada entitas.

1. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statitik lainnya.

1. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, misalnya entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk sejumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas serta rangkaian aktivitasnya.

1. **Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2015: 8-9), terdapat beberapa kendala yang dapat menyebabkan informasi menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan, yaitu:

1. Tepat waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga dapat mengurangi keandalan informasi yang dihasilkan. Dan sebaliknya, jika pelaporan ditunda hingga seluruh aspek diketahui, maka informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat lagi bagi pengambil keputusan.

1. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi dalam laporan keuangan seharusnya melebihi biaya penyusunannya.

1. Keseimbangan di antara karakteristik kualitatif

Dalam praktiknya, keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya, tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.

1. Penyajian wajar

Penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.

***Timeliness***

Pengertian *timeliness* menurut Kieso et al. (2011: 47):

“*Timeliness means having information available to decision-makers before it loses its capacity to influence decisions. Having relevant information available sooner can enhance its capacity to influence decisions, and a lack of timeliness can rob information of its usefulness.*”

Menurut Swardjono (2010: 170):

“Ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.”

Sedangkan dalam penelitian Murtini dan Tirtaningrum (2014):

“*Timeliness* adalah rentang waktu pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik, atau lamanya hari yang dibutuhkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik, sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal penyerahan ke OJK.”

Menurut Ang (1997) dalam Respati (2004) bahwa informasi yang tepat waktu berarti jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum. Dyer dan Mchugh (1975), menggunakan tiga kriteria keterlambatan pelaporan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya:

1. *Preliminary lag*

Interval jumlah hari tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir (*preliminary*) oleh bursa.

1. *Auditor’s report lag*

Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.

1. *Total lag*

Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa.

**Gambar 2.1**

**Tiga Jenis Reporting Lags**

*Total Lags*

*Auditor’s Signature Lags*

*Preliminary Lags*

*End Unaudited Financial Financial*

*Of Financial Statement Statement*

*Year Statement Audited Published*

Sumber: Data diolah

Pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia diatur oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menjelaskan kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan yang berisi informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan perusahaan publik.

Ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, diberlakukanlah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 yang diperbaharui kembali dengan keluarnya Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dimana hal tersebut tidak hanya sekedar untuk efektivitas pengawasan oleh BAPEPAM dan ketersdiaan informasi bagi masyarakat, tapi juga diperlukan oleh investor (pemodal) sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Laporan keuangan yang harus disampaikan ke BAPEPAM antara lain: a. neraca, b. laporan laba rugi komprehensif, c. laporan perubahan ekuitas, d. laporan arus kas, e. catatan atas laporan keuangan, f. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di Indonesia bahwa tepat waktu merupakan kewajiban bagi perusahaan terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Pada tahun 1996, BAPEPAM mengeluarkan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. 80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan. Namun sejak tanggal 5 Juli 2011, BAPEPAM semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Pada tanggal 1 Agustus 2012, BAPEPAM dan LK mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perushaan Publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BAPEPAM dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Tanggal 31 Desember 2012, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa tugas dan fungsi BAPEPAM dan LK berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, pada tanggal 29 Juli 2016, OJK mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan yang membuat laporan keuangan keuangan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 ini menggantikan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-431/BL/2012.

Jadi, laporan keuangan yang tepat waktu dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan manfaat di dalam mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil investor.

**Manajemen Laba**

1. **Definisi Manajemen Laba**

Definisi manajemen laba menurut Scott (2015: 445):

“*Earnings management is the choice by manager of accounting policies, or real actions, affecting earnings so as to achieve some specific reported earning objective.*”

Menurut Nuryaman (2008) manajemen laba adalah tindakan manajer mengatur laba dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginannya. Sedangkan Setiawati (2002) menyatakan manajemen laba sebagai campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri (manajer).

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba dengan memilih kebijakan akuntansi tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu. Manajemen laba dilakukan agar laba terlihat seperti yang diharapkan dan hal ini dapat mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan dan menyesatkan *stakeholders* karena laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

Scott (2015: 444-445) memandang manajemen laba melalui dua persepsi. Pertama, memandang manajemen laba dari perspektif *financial reporting* yaitu manajemen laba digunakan oleh manajer untuk menghindari kerugian dalam pelaporan atau untuk mencapai laba sesuai dengan yang diramalkan. Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif *contracting*. Manajemen laba dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk melindungi perusahaan dari konsekuensi atas kejadian-kejadian tidak terduga ketika kontrak-kontrak tersebut kaku dan tidak lengkap. Dengan manajemen laba, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya dengan membuat perataan laba dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

1. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba**

Ada beberapa faktor mengenai motivasi manajemen laba. Watts dan Zimmerman (1986) mengemukakan tiga faktor yang terkait dengan perilaku manajer dalam pemilihan kebijakan akuntansi yang disebut dengan tiga hipotesis teori akuntansi positif. Tiga faktor ini adalah:

1. Hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*)

Hipotesis ini membicarakan mengenai hubungan pemilihan metode akuntansi dengan bonus yang akan didapatkan oleh manajer. Manajer akan cenderung memilih metode yang akan memaksimalkan utilitasnya demi mendapatkan bonus yang tinggi. Rencana bonus berdasarkan laba dapat memotivasi manajemen perusahaan untuk lebih banyak menggunkan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

1. Hipotesis ekuitas utang (*debt covenant hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin tinggi ekuitas yang dimiliki perusahaan, maka sama dengan semakin dekatnya perusahaan terhadap batasan yang terdapat dalam perjanjian utang dan semakin terbuka kesempatan terjadinya pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar kemungkinan para manajer akan menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba.

1. Hipotesis biaya politis (*political cost hypothesis*)

Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka akan semakin besar kemungkinan bagi perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal ini disebabkan oleh peraturan dan sikap dari pemerintah yang akan segera mengambil tindakan terhadap perusahaan yang memiliki laba terlalu tinggi.

1. **Pola Manajemen Laba**

Menurut Scott (2015:447) terdapat beberapa pola manajemen laba, yaitu:

1. *Taking a bath*

Pola ini terjadi saat perusahaan sedang memasuki periode reorganisasi, contohnya adalah pengangkatan manajer atau CEO baru. Jika perusahaan harus melaporkan kerugian, manajer atau CEO mungkin merasa perlu untuk melaporkan rugi yang besar. Dengan begitu, diharapkan di masa mendatang kemungkinan untuk memperoleh laba meningkat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan *write off* terhadap aset, membebankan biaya-biaya pada periode tahun berjalan.

1. *Income minimization*

Pola ini mirip dengan *taking a bath* tetapi lebih tidak ekstrim. Pola ini dilakukan perusahaan saat perusahaan memiliki profitabilitas tinggi untuk mengurangi biaya politis. Salah satu caranya adalah dengan menambah biaya iklan dan R&D (*Research and Development*).

1. *Income maximization*

Pola ini dilakukan saat manajer mengejar bonus dan menghindari pelanggaran perjanjian utang. Perusahaan yang akan melakukan IPO juga akan memaksimumkan perolehan labanya dengan harapan dapat meningkatkan harga yang lebih tinggi untuk sahamnya.

1. *Income smoothing*

Semakin berubah-ubah laba perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. *Income smoothing* dilakukan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan dengan harapan mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar sehingga kondisi perusahaan terlihat lebih stabil dan mengurangi resiko perusahaan melanggar perjanjian utang.

Menurut Setiawati dan Na’im (2000) terdapat tiga teknik dalam melakukan manajemen laba, yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara ini merupakan cara manajer untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi antara lain: estimasi tingkat piutang tak tertagih, biaya amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.

1. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contoh: metode penilaian persediaan (FIFO atau *average*), metode depresiasi aktiva tetap (garis lurus, jumlah angka tahun, dan lain-lain).

1. Menggeser periode pendapatan atau biaya

Penggeseran periode biaya atau pendapatan dapat mempengaruhi perolehan laba. Contoh: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk biaya R&D sampai pada periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk kepada pelanggan.

***Good Corporate Governance***

1. **Definisi *Good Corporate Governance***

Definisi *good corporate governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011:

“Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI, 2009):

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Menurut Monks (2003) dalam Dwiyani et al. (2017) *good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan.

*Good corporate governance* menyediakan pedoman bagaimana mengendalikan dan mengarahkan perusahaan sehingga dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang dapat menambah nilai perusahaan dan dapat bermanfaat untuk seluruh *stakeholders* dalam jangka panjang. *Stakeholders* dalam hal ini adalah termasuk semua pihak dari dewan direksi, manajemen, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.

1. **Tujuan *Good Corporate Governance***

Tujuan utama *good corporate governace* menurut *Organization for Economic Cooperation & Development* (OECD, 2015) adalah:

1. Untuk mengurangi kesenjangan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan (pemegang saham mayoritas dan pemegang saham lainnya).
2. Meningkatkan kepercayaan bagi para investor dalam melakukan investasi.
3. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
4. Meyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan perusahaan.
5. Menciptakan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antara para *stakeholders* (kreditur, investor, karyawan perusahaan, *bondholders*, pemerintah, dan *shareholders*).
6. **Prinsip-prinsip Dasar *Good Corporate Governance***

Menurut OECD (2015), prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak para pemegang saham,
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham,
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *good corporate governance,*
4. Transparansi dan penjelasan,
5. Peranan dewan komisaris.

Menurut Pedoman Umum Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006: 3), *good corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan *good corporate governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Menurut FCGI (2009), terdapat prinsip dasar yang berlaku universal dalam *good corporate governance* yaitu setiap perusahaan harus mempunyai pengelola perusahaan yang inovatif, yang bersedia untuk mengambil resiko yang wajar, dan yang senantiasa mengembangkan strategi baru untuk mengantisipasi situasi yang berubah-ubah.

1. **Azas *Good Corporate Governance***

Menurut KNKG (2006: 5-7), asas *good corporate governance* meliputi lima asas yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Objektivitas dalam menjalankan bisnis harus tetap dijaga oleh perusahaan dengan menyediakan informasi yang material dan relevan, serta mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh perundang-undangan, tetapi juga informasi yang penting untuk pengambilan keputusan baik bagi pemegang saham, kreditur, ataupun pemangku kepentingan lainnya.

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

1. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

1. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

1. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

1. **Mekanisme *Good Corporate Governance***
2. **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi baik yang bergerak dalam bidang keuangan atau non keuangan atau badan hukum lain (Dwiyani et al., 2017). Yang dimaksud dengan pihak institusi adalah LSM, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun, maupun perusahaan swasta. Investor institusional mengingkan *return* dalam jangka panjang, sehingga institusi ini secara profesional akan memonitor manajemen dalam mengelola perusahaan untuk memantau perkembangan investasinya. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *good corporate governance* yang kuat (Mahendra dan Putra, 2014).

Semakin besar presentase saham yang dimiliki oleh pihak institusional sebagai investor yang lebih berpengalaman dan tidak mudah diperdaya dibandingkan investor individual, maka pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan meminimalisir tingkat penyelewengan seperti manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Kepemilikan institusional selaku investor juga mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen untuk lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan, karena kepemilikan institusional dapat menggunakan hak suaranya untuk mempengaruhi keputusan manajemen.

1. **Dewan Komisaris**

Dewan komisaris merupakan salah satu inti dalam pelaksanaan mekanisme *good corporate governance* di perusahaan. Menurut KNKG (2006), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional, hanya dapat mengawasi dan memberikan arahan kepada manajemen dalam mengelola perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka pengawasan akan semakin ketat terhadap kinerja manajer termasuk mengawasi manajer dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan akan mengandung informasi yang sebenarnya tentang kondisi keuangan perusahaan atau terhindar dari manajemen laba.

Berdasarkan FCGI (2009)*,* tugas utama dewan komisaris adalah:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi, dan penjualan aset.
2. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
3. Memonitor pelaksanaan *good corporate governance* dan mengadakan perubahan dimana diperlukan.
4. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.
5. **Komite Audit**

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mewajibkan perusahaan untuk mempunyai komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Fungsi komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris dalam dalam mengawasi pihak manajemen. Menurut KNKG (2006), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk mengawasi dan memastikan bahwa:

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku,

Salah satu anggota komite audit harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keuangan dan akuntansi (FCGI, 2009). Oleh karena itu, komite audit dapat melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan oleh manajer, memeriksa dan analisis informasi keuangan dengan baik sehingga dapat mencegah manajemen dalam melakukan manajemen laba. Selain itu komite audit juga dapat mengawasi pelaksanaan audit oleh auditor independen. Dengan demikian, keberadaan komite audit yang dapat mengurangi manajemen laba dan mengawasi proses audit oleh auditor independen dapat mempercepat proses audit yang kemudian menyebabkan perusahaan dapat tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

1. **Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Risky Amelia |
| Judul Penelitian | Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan |
| Objek Penelitian | Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2007–2010 |
| Tahun Penelitian | 2013 |
| Sampel | 136 perusahaan manufaktur |
| Hasil Penelitian | Kepemilikan manajerial, komite audit, dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan untuk kepemilikan institusional dan kualitas audit terbukti tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. |
|  | |
| Nama Peneliti | Merlinda Toding dan Made Gede Wirakusuma |
| Judul Penelitian | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan |
| Objek Penelitian | Seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2007–2010 |
| Tahun Penelitian | 2013 |
| Sampel | 88 perusahaan perbankan |
| Hasil Penelitian | Profitabilitas dan reputasi KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Sedangkan l*everage*, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyampaia laporan keuangan. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Ida Bagus Kade Yogi Mahendra dan I Nyoman Wijana Asmara Putra |
| Judul Penelitian | Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatwaktuan |
| Objek Penelitian | Seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2009–2012 |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Sampel | 92 perusahaan perbankan |
| Hasil Penelitian | Komisaris independen, kepemilikan institusonal, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan tahunan. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan tahunan. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Ni Nyoman Anggar Seni dan I Made Mertha |
| Judul Penelitian | Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Auditor, dan Kesulitan Keuangan pada Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan |
| Objek Penelitian | Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2010–2012 |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Sampel | 111 perusahaan manufaktur |
| Hasil Penelitian | Manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, kualitas auditor dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Siti Fatimah, Ethika, dan Yunilma |
| Judul Penelitian | Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Umur Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI |
| Objek Penelitian | Seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2009–2013 |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Sampel | 105 perusahaan perbankan |
| Hasil Penelitian | Umur perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampain laporan keuangan. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | I Gede Ari Pramana Putra dan I Wayan Ramantha |
| Judul Penelitian | Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit pada Ketepatwaktuan Publikasi Laporan Keuangan Tahunan |
| Objek Penelitian | Seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2011–2013 |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Sampel | 78 perusahaan perbankan |
| Hasil Penelitian | Profitabilitas, umur perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan tahunan. Sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan tahunan. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Lailah Fujianti |
| Judul Penelitian | *Analysis Market Reaction on Timeliness Reporting: Study on Indonesia Stock Exchange* |
| Objek Penelitian | Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2012 |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Sampel | 96 perusahaan manufaktur |
| Hasil Penelitian | Sruktur kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *timeliness reporting.* Sedangkan struktur kepemilikan manajemen dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *timeliness reporting.* Kemudian tidak ada perbedaan reaksi pasar atas perusahaan memenuhi *timeliness reporting* dengan yang tidak memenuhi *timeliness reporting*. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Eka Syifa Isani dan Wiwik Hidajah Ekowati |
| Judul Penelitian | Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan |
| Objek Penelitian | Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2011–2013 |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Sampel | 252 perusahaan perbankan |
| Hasil Penelitian | Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Jovi Aryadi Joened dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi |
| Judul Penelitian | Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Opini Auditor, Profitabilitas, dan Reputasi Auditor pada *Timeliness of Financial Reporting* |
| Objek Penelitian | Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2013 |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Sampel | 404 perusahaan |
| Hasil Penelitian | Ukuran dewan komisaris, opini auditor, profitabilitas, dan reputasi auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap *timeliness of financial reporting*. Sedangkan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *timeliness of financial reporting*. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | A. A. Sagung Sinta Maha Dewi dan A. A. N. B. Dwirandra |
| Judul Penelitian | Sanksi sebagai Pemoderasi Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, dan *Leverage* pada Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan |
| Objek Penelitian | Seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2013–2015 |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Sampel | 78 perusahaan pertambangan |
| Hasil Penelitian | Manajemen laba, likuiditas, *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sanksi tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan sanksi tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, sanksi mampu memoderasi pengaruh *leverage* pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Sagung Agung Dwiyani, I Dewa Nyoman Badera, dan I Putu Sudana |
| Judul Penelitian | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatwaktuan Penyajian Laporan Keuangan |
| Objek Penelitian | Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2012–2015 |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Sampel | 232 perusahaan manufaktur |
| Hasil Penelitian | Komite audit, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan penyajian laporan keuangan. Sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *leverage* tidak berpengaruh pada ketepatwaktuan penyajian laporan keuangan juga tidak terdapat perbedaan reaksi pasar atas penyajian laporan keuangan yang tepat waktu maupun yang tidak tepat waktu. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Kurniawati |
| Judul Penelitian | Pengaruh Konvergensi IFRS, Mekanisme *Good Corporate Governance*, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan pada Perusahaan Publik Peraih CGPI *Awards* periode 2011–2012 |
| Objek Penelitian | Perusahaan peraih CGPI *Awards* yang terdaftar di BEI selama tahun 2011–2012 |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Sampel | 20 perusahaan peraih CGPI *Awards* |
| Hasil Penelitian | Ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan. Reputasi KAP memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan ukuran konvergensi IFRS dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. |

1. **Kerangka Pemikiran**
2. **Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Timeliness***

Menurut Nuryaman (2008) manajemen laba adalah tindakan manajer mengatur laba dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginannya. Manajemen laba yang dilakukan oleh manajer ini dilakukan agar laba terlihat seperti yang diharapkan dan hal ini dapat mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan dan menyesatkan *stakeholders* karena laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

Dengan adanya indikasi manajemen laba yang berarti laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, membuat auditor akan memperbanyak prosedur audit untuk menemukan bukti atas perilaku manajemen laba tersebut sehingga auditor akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan proses audit yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan rasional teori agensi yang menyatakan bahwa manajer yang melakukan manajemen laba ini berarti bertindak oportunistik yaitu ingin menguntungkan dirinya sendiri yang akan meningkatkan konflik keagenan dan akhirnya membuat perusahaan tidak dapat tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Seni dan Mertha (2015) yang menemukan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1. **Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Timeliness* yang Dimoderasi Kepemilikan Institusional**

*Timeliness* merupakan hal penting yang diperhatikan oleh pengguna laporan keuangan perusahaan yang sudah dipublikasi. Apabila penyajian laporan keuangan audit semakin lama, maka terdapat indikasi adanya manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Hal ini berlandaskan pada teori agensi yang menyatakan manajer sebagai *agent* akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi permintaan *principal* yang ingin melihat kinerja perusahaan yang terus meningkat, yang dilihat dari laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, sehingga manajer akan melakukan manajemen laba. Namun, jika terdapat indikasi manajemen laba, auditor independen akan mengumpulkan bukti audit semakin banyak untuk mendukung opini audit. Hal inilah yang mempengaruhi lamanya laporan audit diterbitkan dan kemudian menyebabkan perusahaan tidak tepat waktu dalam menyamapaikan laporan keuangannya.

Tetapi manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dapat diminimalisir melalui adanya kepemilikan institusional. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional yang merupakan mekanisme *good corporate governance* dapat mengurangi konflik yang terdapat dalam perusahaan dengan cara mengawasi laporan keuangan perusahaan untuk memastikan perusahaan menaati aturan keuangan yang berlaku yang berarti akan mengurangi manajemen laba dan dapat mendorong ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurut Dwiyani et al. (2017) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi baik yang bergerak dalam bidang keuangan atau non keuangan atau badan hukum lain. Kepemilikan institusional yang merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* dapat mengurangi manajemen laba karena investor institusional merupakan investor yang lebih berpengalaman dan dapat melakukan analisa laporan keuangan yang lebih baik sehingga lebih tidak mudah diperdaya oleh manajemen dibandingkan investor individual. Dengan adanya pengawasan oleh investor institusional, manajer akan menghindari perilaku oportunistik dan manajemen laba.

Mahendra dan Putra (2014) dan Fujianti (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena investor institusional yang dapat mengawasi manajer dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dan juga mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu melalui hak suaranya, sehingga manajer akan menghindari manajemen laba dan memilih untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya agar proses pengauditan laporan keuangan perusahaan oleh auditor menjadi lebih cepat dan perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu sesuai dengan keinginan investor institusional.

1. **Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Timeliness* yang Dimoderasi Dewan Komisaris**

Manajemen laba juga dapat diminimalisir dengan adanya dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan salah satu inti dalam pelaksanaan mekanisme *good corporate governance* di perusahaan. Menurut KNKG (2006), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Dewan komisaris juga bertugas untuk mengawasi kinerja manajer termasuk mengawasi manajer dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan.

Joened dan Damayanthi (2016) dan Kurniawati (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh secara positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Jika ukuran dewan komisaris semakin besar, maka akan semakin ketat pula pengawasan terhadap manajer dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pengawasan yang ketat ini akan mengurangi manajer dalam melakukan manajemen laba dan memilih untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sehingga akan mengurangi waktu pengauditan laporan keuangan oleh auditor independen yang kemudian membuat perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini dikarenakan dewan komisaris yang merupakan mekanisme *good corporate governance* dapat mengurangi konflik yang terdapat dalam perusahaan dengan cara mengawasi laporan keuangan perusahaan untuk memastikan perusahaan menaati aturan keuangan yang berlaku yang berarti akan mengurangi manajemen laba dan akhirnya akan dapat mendorong ketepatan waktu pelaporan keuangan

1. **Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Timeliness* yang Dimoderasi Komite Audit**

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mewajibkan perusahaan untuk mempunyai komite audit. Komite audit sebagai salah satu mekanisme *good corporate governance* adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Salah satu anggota komite audit harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keuangan dan akuntansi (FCGI, 2009). Oleh karena itu, komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan oleh manajer, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijakan keuangan yang berlaku dan analisis informasi keuangan dengan baik sehingga dapat mencegah manajemen dalam melakukan manajemen laba. Selain itu komite audit juga dapat mengawasi audit laporan keuangan oleh auditor independen.

Dengan demikian, keberadaan komite audit yang dapat mengurangi manajemen laba dalam laporan keuangan dan juga mengawasi proses audit oleh auditor independen akan membuat proses audit oleh auditor independen menjadi lebih cepat sehingga perusahaan akan dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini dikarenakan komite audit yang merupakan mekanisme *good corporate governance* dapat mengurangi konflik yang terdapat dalam perusahaan dengan cara mengawasi laporan keuangan perusahaan untuk memastikan perusahaan menaati aturan keuangan yang berlaku yang berarti akan mengurangi manajemen laba dan akhirnya akan dapat mendorong ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Amelia (2013) dan Dwiyani et al. (2017) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara positif yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan*.*

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Manajemen Laba

*Timeliness*

Komite Audit

Dewan Komisaris

Kepemilikan Institusional

1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap *timeliness*.

H2:Kepemilikan institusional memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap

*timeliness*.

H3: Dewan komisaris memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness.*

H4: Komite audit memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness.*